

Inflasi Nasional 2,86 Persen, Tito Karnavian Laporkan Kondisi Ekonomi Daerah ke Presiden Prabowo

Aa Ruslan Sutisna - SUKABUMI.WARTAWAN.ORG

Nov 25, 2025 - 12:55



Inflasi Nasional 2,86 Persen, Tito Karnavian Laporkan Kondisi Ekonomi Daerah ke Presiden Prabowo

24 November 2025 Suasana Istana Merdeka pada Senin siang terasa serius ketika Presiden Prabowo Subianto menerima laporan langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Fokus utama pertemuan ini adalah kondisi inflasi nasional, dinamika harga pangan, serta perkembangan ekonomi daerah.

Mendagri Tito menyampaikan bahwa inflasi nasional masih dalam batas aman. Angka year-on-year tercatat 2,86 persen, sementara year-to-date berada di 2,1 persen.

“Artinya cukup terkendali baik, terutama sektor pangan juga malah menjadi penyeimbang deflasi,” ucapnya.

Ia menambahkan, komoditas beras yang sebelumnya menjadi perhatian kini menunjukkan perbaikan signifikan.

“Daerah-daerah yang mengalami penurunan (harga) makin banyak, yang mengalami kenaikan hanya sedikit sekali. Dan itu sudah dicover dengan baik saya kira oleh Menteri Pertanian Pak Amran, sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian juga Bulog bekerja sama dengan teman-teman Pemda,” tuturnya.

Meski begitu, Tito mengingatkan adanya kenaikan harga pada bawang merah, cabai, dan sedikit pada telur ayam ras. Hal ini, menurutnya, perlu diantisipasi agar tidak mengganggu program MBG.

Selain inflasi, laporan Mendagri juga menyinggung pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebut Maluku Utara sebagai daerah dengan pertumbuhan tertinggi, sementara Papua Tengah mengalami kontraksi.

“Yang tertinggi misalnya Maluku Utara, ada yang minus yaitu Papua Tengah. Saya sampaikan, beliau tanya kenapa penyebabnya, di antaranya karena adanya ekspor dari Freeport yang tertahan, adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor ya di mana produksinya mereka menjadi tertahan. Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika, itu mengalami kontraksi minus 8 persen,” jelasnya.

Tito juga melaporkan realisasi pendapatan dan belanja daerah per 23 November 2025. Dari 552 daerah, rata-rata pendapatan mencapai 82–83 persen, sementara belanja daerah baru sekitar 68 persen.

“Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen gitu,” katanya.

Tak berhenti di situ, Mendagri turut menyampaikan isu strategis lain, termasuk percepatan pembangunan Papua.

“Saya minta kepada Bapak Presiden berkenan untuk menerima mereka, sekaligus memberikan arahan. Kalau bisa serempak dengan para kepala daerah se-Papua dalam rangka percepatan pembangunan,” ujarnya.

Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta memastikan pembangunan berjalan merata hingga ke wilayah timur Indonesia.